SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.1.2/285 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.1.2/29 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2026

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026 dan adanya usulan rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3.1.2/29 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana atelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);
8. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3.1.2/29 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3.1.2/29 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2026 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Agustus 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Tembusan; disampaikan kepada,Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani oleh
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

KISTORO, S.E., M.M.
NIP. 19750503 201001 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 100.3.1.2/285 Tahun 2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2026

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
2.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
3.	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	RSUD KAJEN
4.	Detail Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	RSUD KRATON
5.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	RSUD KRATON
6.	Remunerasi pada BLUD Kabupaten Pekalongan	DINAS KESEHATAN, RSUD KRATON, RSUD KAJEN DAN RSUD KESESI
7.	Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DINPERINDAG
8.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	BPKD
9.	Penjabaran Perubahan APBD TA 2026	BPKD
10.	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027	BPKD
11.	Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2027	BPKD
12.	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026	BPKD
13.	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027	BPKD
14.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	BPKD
15.	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKD
16.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan	BPKD

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
	Penghapusan Pajak Daerah Beserta Sanksi Administrasinya	
17.	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	BPKD
18.	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027	DINAS PMD
19.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	DINAS PMD
20.	Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	DINAS PMD
21.	Standar Pelayanan Minimal Desa	DINAS PMD
22.	Batas Desa Karangsari Kecamatan Bojong	DINAS PMD
23.	Batas Desa Babalan Lor Kecamatan Bojong	DINAS PMD
24.	Batas Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong	DINAS PMD
25.	Batas Desa Sembung Jambu Kecamatan Bojong	DINAS PMD
26.	Batas Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong	DINAS PMD
27.	Batas Desa Wiroditan Kecamatan Bojong	DINAS PMD
28.	Batas Desa Bojong Minggir Kecamatan Bojong	DINAS PMD
29.	Batas Desa Kemasan Kecamatan Bojong	DINAS PMD
30.	Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027	DINAS PMD
31.	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERKIM DAN LH
32.	Rencana Induk Pengelolaan Sampah	DINAS PERKIM DAN LH
33.	Pembentukan Desa Mandiri Sampah	DINAS PERKIM DAN LH
34.	Peta Jalan Kependudukan	DINAS P3A DAN PPKB
35.	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak	DINAS P3A DAN PPKB
36.	Organ dan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kajen	BAGIAN PEREKONOMIAN
37.	Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Kajen	BAGIAN PEREKONOMIAN
38.	Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	DINDUKCAPIL
39.	Pendaftaran Penduduk Non Permanen	DINDUKCAPIL
40.	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
41.	Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Di lingkungan Pemerintah Daerah	DINKOMINFO
42.	Pendeleasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PM PTSP
43.	Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Dan non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PM PTSP
44.	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Dan non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PM PTSP
45.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2925 tentang Penyelenggaraan Reklame	DINAS PM PTSP
46.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	BAPPERIDA
47.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026	BAPPERIDA
48.	Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027	BAPPERIDA
49.	Rencana Aksi daerah Tujuan pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2026 - 2029	BAPPERIDA
50.	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2026-2029	BAPPERIDA
51.	Pedoman Penyelengaraan Riset dan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
52.	Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Tahun 2026	INSPEKTORAT
53.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Pekalongan	INSPEKTORAT
54.	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengolah Lumpur Tinja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BAGIAN ORGANISASI
55.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
56.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton	BAGIAN ORGANISASI
57.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	BAGIAN ORGANISASI

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
	pada Rumah Sakit Umum Daerah Kajen	
58.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BAGIAN ORGANISASI
59.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BAGIAN ORGANISASI
60.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	BAGIAN ORGANISASI
61.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi	BAGIAN ORGANISASI
62.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah	BAGIAN ORGANISASI
63.	Pembentukan,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	BAGIAN ORGANISASI
64.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
65.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	BAGIAN ORGANISASI
66.	Rencana Kontijensi Bencana Banjir Daerah	BPBD
67.	Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Siwalan	DPU TARU
68.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	BAKESBANGPOL
69.	Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	BAKESBANGPOL
70.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	DINPORAPAR
71.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata	DINPORAPAR

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
72.	Tunjangan Resiko Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pekalongan	SATPOL PP DAN DAMKAR
73.	Penyelenggaraan Parkir Kabupaten Pekalongan	DINAS PERHUBUNGAN
74.	Pedoman Penggunaan Arsip Tertutup	DINAS ARPUS
75.	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren	DINDIKBUD DAN BAGIAN KESRA
76.	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintaha daerah Tahun 2026-2030	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
77.	Sistem Pembelanjaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*)	BKPSDM

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

TTD

SUKIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani oleh
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

KISTORO, S.E., M.M.
NIP. 19750503 201001 1 001